PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

Dirga Putra Hasmul Baedawi
NPP. 33.0920
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: dirgabaedawi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si
Email: petruspholl@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Fire disasters remained the most frequent type of disaster in Makassar City in 2024 despite the involvement of various government institutions such as the Fire and Rescue Service, BPBD, Social Service, and security forces in handling fire emergencies. However, each fire incident still caused significant losses in terms of casualties and property damage. This condition indicates a gap between the institutional arrangements that have been established and the implementation of the emergency fire response management system in the field.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to determine the implementation of emergency fire disaster response management by the Regional Government of Makassar City in 2024.* ***Method:*** *This study uses a qualitative method with a descriptive approach and analysis based on the dimensions of the Emergency Response System. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. The study involved 8 informants selected through purposive sampling. The main informant comes from the Makassar City Fire and Rescue Department because it is a local government organization that has duties and functions in handling fires and rescues. Supporting informants come from agencies involved in fire management, such as the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the Social Service, sub-districts, urban villages, as well as other parties involved in the emergency fire response process.* ***Result:*** *The findings of this study indicate that in the Alarm Receipt dimension, the fire reporting system is still not integrated and does not yet have systematically documented response time data. In the Emergency Evaluation dimension, the determination of hazard levels and resource needs remains subjective due to the absence of standardized parameters. In the Launch Corresponding Emergency Plans dimension, emergency response activation has been implemented according to SOPs, although its implementation is still influenced by field conditions. In the Emergency Rescue Actions dimension, firefighting and evacuation processes still face obstacles related to location access, traffic congestion, limited water resources, and building conditions. In the Emergency Recovery dimension, cooling and rechecking procedures have been carried out, but they do not yet have standardized written SOPs. Meanwhile, in the Evaluate Result and Feedback dimension as well as inter-agency coordination, evaluation and coordination have been conducted but still lack formally standardized mechanisms.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of emergency fire disaster response management in Makassar City has been carried out, but it is still not optimal. The study recommends strengthening the integration of the reporting system, standardizing evaluation procedures, and developing more formal inter-agency coordination mechanisms so that fire disaster management can be conducted more quickly, measurably, and coordinately.*

Keywords: *Emergency Fire Disaster; Emergency Response System; Emergency Response Management; Regional Government.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Bencana kebakaran masih menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kota Makassar pada tahun 2024 meskipun penanganannya telah melibatkan berbagai kelembagaan pemerintah seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, Dinas Sosial, serta unsur keamanan. Namun demikian, setiap kejadian kebakaran masih menimbulkan kerugian berupa korban jiwa maupun kerugian harta benda yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kelembagaan yang telah dibentuk dengan pelaksanaan sistem manajemen tanggap darurat kebakaran di lapangan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis menggunakan dimensi *Emergency Response System.* Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian melibatkan 8 informan. Informan utama berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar karena merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan. Informan pendukung berasal dari instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses tanggap darurat kebakaran. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi *Alarm Receipt*, sistem pelaporan kebakaran masih belum terintegrasi dan belum memiliki data waktu repons yang terdokumentasi secara sistematis. Pada dimensi *Emergency evaluation*, penentuan tingkat bahaya dan kebutuhan sumber daya masih bersifat subjektif karena belum terdapat parameter baku. Pada dimensi *Launch Corresponding Emergency Plans*, aktivasi tanggap darurat telah berjalan sesuai SOP, namun pelaksanaannya masih dipengaruhi kondisi lapangan. Pada dimensi *Emergency Rescue Action*, proses pemadaman dan evakuasi masih menghadapi hambatan akses lokasi, kemacetan, keterbatasan sumber air, dan kondisi bangunan. Pada dimensi *Emergency Recovery*, proses pendinginan dan pengecekan ulang telah berjalan, namun belum memiliki SOP tertulis yang baku. Sementara itu, pada dimensi *Evaluate Result and Feedback* serta koordinasi antar instansi, evaluasi dan koordinasi telah dilakukan namun belum memiliki mekanisme yang terstandarisasi secara formal. **Kesimpulan:** penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran di Kota Makassar telah berjalan, namun masih belum optimal. Adapun saran penelitian ini yaitu perlunya penguatan integrasi sistem pelaporan, standarisasi evaluasi, serta penyusunan mekanisme koordinasi yang lebih baku antar instansi agar penanganan kebakaran dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi.

Kata kunci: Bencana Kebakaran; Emergency Response System; Manajemen Tanggap Darurat; Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana dapat terjadi di seluruh tempat, pada setiap waktu, dan dapat menimpa siapapun tanpa dapat diprediksi dengan pasti. Ketidakpastian ini menjadikannya ancaman yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, diperlukan manajemen bencana yang komprehensif dan terstruktur untuk meminimalkan dampaknya. Manajemen yang baik mencakup serangkaian tahapan berkesinambungan, mulai dari perencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan (Adiyoso, 2018) Dalam praktiknya, kompleksitas penerapan manajemen ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan, yang menuntut pendekatan yang berbeda untuk konteks yang berbeda

Salah satu konteks lingkungan yang menuntut pendekatan khusus dalam manajemen bencana adalah wilayah perkotaan. Di kota-kota besar, kompleksitas tantangan seperti kepadatan penduduk, pertumbuhan permukiman yang pesat, dan keterbatasan infrastruktur turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko bencana, di samping faktor alam yang sudah ada. Kondisi ini tidak hanya memperparah kerentanan, tetapi juga menuntut transformasi pendekatan manajemen bencana ke arah yang lebih disiplin, strategis, dan kolaboratif guna mewujudkan ketahanan keberlanjutan kawasan perkotaan (Dandoulaki dkk., 2023). Oleh karena itu, manajemen bencana di perkotaan menjadi salah satu isu penting dalam diskursus publik, karena dampaknya yang luas terhadap aspek sosial dan ekonomi kota, sehingga menuntut solusi yang nyata dan terarah untuk memperkuat sistem manajemen bencana di wilayah perkotaan.

Salah satu perhatian penting dalam manajemen bencana di perkotaan adalah masa tanggap darurat. Periode ini merupakan fase yang paling menantang karena berbagai keterbatasan dan tekanan yang menyertainya. Manajemen tanggap darurat meliputi semua kegiatan yang dilakukan segera setelah setelah terjadi bencana untuk memberi pertolongan dan mengurangi penderitaan masyarakat (Eviany & Sutiyo, 2023). Masyarakat yang terdampak bencana berada dalam kondisi *stress* tinggi, sementara di sisi lain, keterbatasan waktu, informasi, dan sumber daya mengharuskan respons yang cepat dan efektif untuk meminimalkan kerugian (Adiyoso, 2018). Selain kecepatan respons operasional, keberhasilan layanan pemadaman kebakaran juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi dalam penyelenggaraan tanggap darurat. Keberhasilan penanganan kebakaran tidak hanya ditentukan oleh kecepatan respons fisik, tetapi juga oleh kualitas komunikasi publik sebelum dan sesaat setelah kejadian. Oleh karena itu, optimalisasi komunikasi, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital, menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung layanan pemadam kebakaran yang modern (Madjid dkk., 2025) Kecepatan dan kualitas respons dalam masa tanggap darurat berkolerasi langsung dengan besaran dampak bencana. Semakin cepat dan terkoordinir respons, semakin minimal dampak yang ditimbulkan. Sebaliknya, lambatnya respons dapat memperparah dampak bencana, sebagaimana tercermin dalam penanganan gempa bumi dan tsunami Kota Palu pada tahun 2018, dimana keterlambatan respons yang diakibatkan oleh terputusnya akses komunikasi dan transportasi, mengakibatkan dampak yang jauh lebih parah bagi masyarakat (BNPB, 2018)

Dalam konteks perkotaan seperti Kota Makassar, urgensi fase tanggap darurat menjadi semakin nyata mengingat tingginya frekuensi kejadian kebakaran. Data menunjukkan bahwa kebakaran merupakan jenis bencana dengan frekuensi tertinggi di kota ini selama lima tahun kebelakang, sebagaimana tercantum pada Tabel 1

Tabel 1 Bencana Di Kota Makassar 2020-2024

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian				
	2020	2021	2022	2023	2024

Kebakaran	141	138	151	395	303
Banjir	20	94	142	133	63
Angin Puting beliung	5	16	120	69	26
Pohon Tumbang	5	11	96	107	24

Sumber *: Satu Data Kota Makassar, BPBD Kota Makassar* (diolah penulis 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya frekuensi kebakaran di Kota Makassar menuntut sistem tanggap darurat yang cepat, terkoordinasi, dan efisien guna meminimalkan kerugian. Karena itu, keberlangsungan sistem tersebut sangat bergantung pada keberadaan lembaga pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengoordinasikan penanganan bencana secara langsung. Lembaga ini berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan respons dan pengelolaan bencana (Reinhardt & Drennan, 2019).

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola dan menangani urusan kebakaran dan penyelamatan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar merupakan organisasi perangkat daerah yang berdiri sendiri dan mempunyai peran strategis sebagai pelaksana utama dalam penanggulangan bencana kebakaran, mencakup pengendalian pemadaman, penyelamatan korban, hingga penyuluhan dan pengawasan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini didukung oleh struktur kelembagaan yang mencakup berbagai bidang dan unit operasional dan juga sumber daya yang signifikan baik dari sisi personel, armada, serta anggaran, sebagaimana tercantum pada tabel 2.,

Tabel 2 Kapasitas Sumber Daya Damkar Kota Makassar

Kategori	Spesifikasi	Kapasitas
Infrastruktur	Posko Pemadam	7 Posko
Armada Operasional	Armada Penembak	33 Unit
	Armada Tangki	24 Unit
	Armada Tangga	3 Unit
	Armada Rescue	3 Unit
Sumber Daya Manusia	PNS & PPPK	202 Orang
	Staf Pendukung	357 Orang
Penunjang Operasional	Peralatan Khusus	Lengkap
	Anggaran	Rp 23,52 Milliar

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar (Diolah Penulis, 2025)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar telah memiliki landasan kelembagaan yang kuat serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Namun demikian, fakta menunjukkan meskipun struktur kelembagaan yang secara khusus menangani persoalan bencana kebakaran sudah terbentuk, setiap kali bencana kebakaran terjadi selalu diikuti dengan kerugian yang begitu besar, baik berupa korban jiwa maupun harta benda, sebagaimana tercatat dalam tabel 3.,

Tabel 3 Kerugian Pada Bencana Kebakaran 2020-2024

Tahun	Kasus kebakaran	Korban Jiwa Terdampak	Kerugian (Rp)
2020	141	516 Jiwa	11.57 Milliar
2021	138	937 Jiwa	22.01 Milliar
2022	151	637 Jiwa	21.62 Milliar

Tahun	Kasus kebakaran	Korban Jiwa Terdampak	Kerugian (Rp)
2023	395	1202 Jiwa	20.64 Milliar
2024	303	548 Jiwa	64.71 Milliar
Total	**1128**	**3840 jiwa**	**140.57 Milliar**

Sumber : dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota makassar, (diolah penulis 2025)

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap peristiwa bencana kebakaran di Kota Makassar selalu menimbulkan kerugian, baik dari sisi korban jiwa maupun harta benda dengan nilai yang cukup fantastis. Ini menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat yang dijalankan belum mampu mengoordinasikan tata kelola penanganan kebakaran secara efektif. Semestinya dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Makassar, sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2024, memiliki sistem tanggap darurat yang efektif untuk meminimalkan kerugian yang bisa ditimbulkan oleh bencana kebakaran.

Pada bagian lain, penanganan kebakaran yang tergolong dalam kategori kebencanaan, tidak hanya ditangani oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, tetapi juga melibatkan lembaga lain yang turut membantu seperti BPBD, Dinsos, PLN, Kecamatan, Kelurahan, hingga unsur keamanan. Semestinya, dengan adanya dukungan dari berbagai lembaga tersebut, penanganan kebakaran dapat dilaksanakan lebih terpadu sehingga dampak dari bencana kebakaran dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan demkian, fakta diatas semakin menegaskan bahwa sistem manajemen tanggap darurat bencana kebakaran di Kota Makassar masih belum memadai dalam penanggulangan bencana kebakaran, yang memperlihatkan adanya ketimpangan antara kelembagaan dan sistem kerja yang dijalankan. Ini kemudian memunculkan persoalan menarik untuk dikaji lebih lanjut agar ke depan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih optimal dalam menekan kerugian yang bisa terjadi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Tingginya frekuensi bencana kebakaran di Kota Makassar yang terus diikuti dengan kerugian korban jiwa maupun harta benda menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen tanggap darurat kebakaran masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kondisi ini menjadi menarik karena Pemerintah Kota Makassar sebenarnya telah membentuk kelembagaan khusus melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta didukung oleh berbagai lembaga lain seperti BPBD, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan unsur keamanan dalam penanganan kebakaran. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar juga telah memiliki sumber daya yang cukup besar baik dari sisi personel, armada, maupun anggaran operasional (Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2024).

Semestinya, dengan dukungan kelembagaan dan sumber daya tersebut, penanganan kebakaran dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan mampu meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa setiap kejadian kebakaran di Kota Makassar masih selalu diikuti dengan kerugian yang cukup besar baik berupa korban jiwa maupun kerugian material (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara kelembagaan yang telah dibentuk dengan sistem tanggap darurat kebakaran yang dijalankan di lapangan.

Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas manajemen bencana secara umum maupun penanganan kebakaran dari aspek teknis operasional, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran pada fase tanggap darurat dengan menggunakan pendekatan *Emergency Response System* dalam konteks pemerintahan daerah perkotaan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji

penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat bencana kebakaran masih menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi di Kota Makassar dan terus menimbulkan kerugian korban jiwa maupun kerugian material yang cukup besar setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen tanggap darurat kebakaran memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak bencana di wilayah perkotaan.

Penelitian ini juga penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar, khususnya pada fase tanggap darurat mulai dari penerimaan laporan, evaluasi keadaan darurat, pelaksanaan respons, pemulihan, hingga evaluasi pasca kejadian dan koordinasi antar instansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam memperkuat sistem tanggap darurat kebakaran agar penanganan kebakaran dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah dan pemangku kebijakan akan mengalami keterbatasan data empiris dalam memahami berbagai kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan tanggap darurat kebakaran di lapangan. Akibatnya, perumusan strategi dan kebijakan penanganan kebakaran berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan belum mampu menjawab kebutuhan nyata dalam penanggulangan kebakaran di Kota Makassar secara optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu mengenai manajemen bencana kebakaran di wilayah perkotaan. Penelitian-penelitian tersebut memiliki variasi fokus pada setiap tahapan manajemen bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.

Pada tahap mitigasi, penelitian Arifin dkk., (2022) yang berjudul *Disaster Mitigation of Slum-Scale Fires in Jongaya Village at Tamalate* mengidentifikasi karakteristik kerentanan kebakaran pada kawasan permukiman di Kota Makassar. Taufiqurokhman dkk., (2023) dalam penelitian *Urban Disaster Urban Fires* menekankan pentingnya edukasi, sosialisasi, dan pengawasan sebagai upaya mitigasi kebakaran di wilayah metropolitan. Sementara itu, Mandalapu dkk., (2024) melalui penelitian *Evaluating Urban Fire Vulnerabilities and Accessibility to Fire Stations and Hospitals in Austin, Texas* mengembangkan pendekatan pemetaan kerentanan dan aksesibilitas layanan darurat.

Pada tahap kesiapsiagaan, Trifianingsih dkk., (2022) dalam penelitian *Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kebakaran di Kota Banjarmasin* mengukur tingkat kesiapsiagaan masyarakat yang menunjukkan mayoritas responden berada pada kategori sangat siap. Padli (2024) dalam penelitian *Kapasitas Masyarakat Kota Makassar terhadap Bencana Kebakaran* menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat masih tergolong rendah akibat kurangnya pelatihan dan sarana pendukung. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada kesiapan individu dan masyarakat dibandingkan sistem kelembagaan tanggap darurat.

Pada tahap tanggap darurat, Widyantoro & Santosa, (2021) dalam penelitian *Network Analysis to Determine the Optimal Route for Firefighters in Makassar City* berfokus pada optimalisasi rute armada pemadam kebakaran. Zhang dkk., (2025) melalui penelitian *Optimization of Urban Fire Emergency Resource Allocation Based on Pre-Allocated Swarm Algorithm* menawarkan model

optimalisasi sumber daya darurat berbasis komputasi. Sementara itu, Harakan dkk., (2025) dalam penelitian *Inter-Agency Collaboration in Building Urban Fire Resilience in Indonesia: How do Metropolitan Cities Address It?* mengidentifikasi hambatan koordinasi antar instansi di Kota Makassar. Barreirinha & Silva-afonso, (2025) dalam penelitian *The Challenges of Firefighters' Interventions in Old Urban Centres: A Case Study* mengungkap hambatan operasional seperti keterbatasan akses jalan dan kesesuaian kendaraan pemadam di kawasan perkotaan.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai manajemen bencana kebakaran telah banyak dilakukan pada berbagai tahapan manajemen bencana. Namun demikian, penelitian mengenai implementasi manajemen tanggap darurat bencana kebakaran masih cenderung terfragmentasi antara kajian kelembagaan dan teknis operasional. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran menggunakan pendekatan *Emergency Response System* dalam konteks pemerintahan daerah perkotaan di Kota Makassar masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran di Kota Makassar.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena berfokus pada penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran secara komprehensif pada fase tanggap darurat, mulai dari penerimaan laporan, evaluasi keadaan darurat, pelaksanaan respons, pemulihan, hingga evaluasi pasca kejadian dan koordinasi antar instansi. Penelitian sebelumnya cenderung membahas manajemen kebakaran secara parsial, baik dari aspek mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, optimalisasi teknis operasional, maupun koordinasi kelembagaan secara terpisah.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Emergency Response System* untuk menganalisis implementasi sistem tanggap darurat bencana kebakaran dalam konteks pemerintahan daerah perkotaan, khususnya di Kota Makassar. Pendekatan ini berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teknis operasional maupun kesiapsiagaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran oleh pemerintah daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024.

II. METODE

Metodologi penelitian merupakan seperangkat cara dan prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data serta menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap proses, dinamika, serta kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan tanggap darurat kebakaran di lapangan. Pendekatan kualitatif sesuai untuk penelitian di bidang pemerintahan karena mampu mengungkap makna-makna subjektif yang dimiliki oleh aktor sosial dalam kebijakan publik (Nurdin & Hartati, 2019). Dalam konteks pemerintahan daerah, metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami struktur dan proses manajerial organisasi secara kontekstual (Simangunsong, 2019). Menurut Sugiyono, (2017),

penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data serta analisis yang dilakukan secara induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan tanggap darurat kebakaran di Kota Makassar. Informan utama berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar karena merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan. Informan pendukung berasal dari instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses tanggap darurat kebakaran. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan tanggap darurat kebakaran dari sisi kebijakan, koordinasi antar instansi, maupun pelaksanaan operasional di lapangan.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Emergency Response System* yang meliputi dimensi *Alarm Receipt, Emergency Evaluation, Launch Corresponding Emergency Plans, Emergency Rescue Actions, Emergency Recovery,* dan *Evaluate Result and Feedback* sebagai kerangka analisis dalam mengkaji penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus penelitian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar serta instansi terkait yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Penelitian dilaksanakan berdasarkan Kalender Akademik IPDN Tahun Akademik 2024/2025 dan berlangsung sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan Juni 2025 yang mencakup kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil (Yadav, 1980). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Alarm Receipt

Penulis menganalisis dimensi *Alarm Receipt* berdasarkan ketersediaan akses pelaporan, akurasi informasi awal, dan kecepatan respon awal. Dimensi ini merupakan tahap awal dalam sistem tanggap darurat yang berfungsi menerima, mencatat, dan memverifikasi laporan kebakaran sebelum dilakukan tindakan lanjutan.

Pada aspek ketersediaan akses pelaporan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar menyediakan dua saluran pelaporan resmi, yaitu nomor WhatsApp 0811410113 dan *Call Center* 112 yang terintegrasi dengan layanan darurat Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara, kedua layanan tersebut beroperasi selama 24 jam melalui sistem piket bergilir. Menurut salah satu informan, pelaporan melalui WhatsApp memungkinkan masyarakat mengirimkan video dan lokasi kejadian secara langsung sehingga memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi awal. Namun demikian, informan juga menjelaskan bahwa efektivitas layanan ini sangat bergantung pada

ketersediaan kuota internet dan kualitas sinyal dari pelapor. Sementara itu, *Call Center* 112 dapat diakses tanpa pulsa dan kuota internet, tetapi laporan harus melalui operator terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan melalui WhatsApp dapat berjalan dengan baik ketika pelapor memiliki akses internet yang memadai. Pada saat terjadi kebakaran dapur di wilayah Posko KIMA, petugas menerima laporan, meminta video serta *share location*, kemudian meneruskan informasi tersebut kepada komandan regu untuk ditindaklanjuti. Namun, berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang pernah melaporkan kebakaran, ditemukan bahwa keterbatasan sinyal dan kuota internet menyebabkan video dan informasi lokasi tidak dapat terkirim secara cepat sehingga berpotensi memperlambat proses penanganan.

Pada aspek akurasi informasi awal, petugas melakukan verifikasi dengan meminta video kondisi kebakaran kepada pelapor. Informan menjelaskan bahwa video digunakan untuk memastikan kebenaran laporan, mengidentifikasi jenis objek yang terbakar, serta menentukan kebutuhan sumber daya yang akan dikerahkan. Akan tetapi, proses verifikasi masih sangat bergantung pada kemampuan pelapor dalam mengirimkan video yang jelas. Selain itu, laporan yang masuk melalui *Call Center* 112 hanya berupa informasi verbal sehingga tingkat akurasinya relatif lebih rendah dibandingkan laporan melalui WhatsApp.

Pada aspek kecepatan respon awal, hasil wawancara menunjukkan bahwa operator diwajibkan segera meneruskan laporan kepada komandan regu sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian, seluruh laporan kebakaran tetap harus diproses terlebih dahulu melalui Markas Komando sebelum diteruskan ke pos wilayah yang lebih dekat dengan lokasi kejadian. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar belum memiliki data rata-rata waktu respon aktual sehingga evaluasi terhadap kinerja respon awal belum dapat dilakukan secara kuantitatif.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi *Alarm Receipt* dalam penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran di Kota Makassar telah berjalan, namun masih menghadapi kendala pada integrasi saluran pelaporan, akurasi informasi awal, serta dokumentasi waktu respon yang belum terdokumentasi secara sistematis.

3.2. Emergency Evaluation

Penulis menganalisis dimensi *Emergency Evaluation* berdasarkan dua indikator, yaitu identifikasi tingkat bahaya kebakaran dan perhitungan kebutuhan sumber daya. Dimensi ini merupakan tahap evaluasi awal yang dilakukan setelah laporan kebakaran diterima untuk menentukan tingkat ancaman serta kebutuhan armada dan personel yang akan dikerahkan ke lokasi kejadian.

Pada indikator identifikasi tingkat bahaya kebakaran, hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap laporan kebakaran diperlakukan sebagai kondisi berbahaya yang memerlukan respons segera. Untuk menentukan tingkat bahaya secara lebih spesifik, petugas memanfaatkan video yang dikirimkan oleh pelapor melalui WhatsApp. Melalui video tersebut, petugas dapat menilai skala kebakaran, mengidentifikasi jenis objek yang terbakar, serta menentukan metode penanganan yang sesuai. Hasil observasi peneliti di Posko Utama menunjukkan bahwa petugas penerima laporan meneruskan video yang diterima kepada komandan regu untuk dilakukan penilaian sebelum keputusan pemberangkatan unit diambil. Dengan demikian, video menjadi sumber informasi utama dalam proses identifikasi tingkat bahaya kebakaran.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa proses identifikasi masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Akurasi penilaian sangat bergantung pada kualitas video yang dikirimkan oleh pelapor. Ketika video tidak jelas, terputus-putus, atau tidak memperlihatkan kondisi api secara menyeluruh, petugas mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat bahaya secara tepat. Selain

itu, laporan yang diterima melalui *Call Center* 112 tidak memungkinkan pengiriman video sehingga identifikasi hanya dilakukan berdasarkan informasi verbal yang disampaikan pelapor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses identifikasi tingkat bahaya masih dipengaruhi oleh faktor teknis di luar kendali petugas.

Pada indikator perhitungan kebutuhan sumber daya, hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh laporan kebakaran terlebih dahulu diproses melalui Posko Utama sebelum diteruskan kepada pos yang wilayah kerjanya paling dekat dengan lokasi kejadian. Berdasarkan hasil identifikasi awal, komandan regu menentukan jumlah armada dan personel yang diperlukan, kemudian keputusan tersebut memperoleh persetujuan dari perwira piket di Markas Komando. Hasil observasi menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik dalam kondisi normal dan memungkinkan pemberangkatan unit sesuai kebutuhan lapangan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa hingga saat ini belum terdapat formula baku yang digunakan untuk menentukan kebutuhan armada berdasarkan tingkat bahaya kebakaran. Keputusan jumlah armada yang diberangkatkan masih banyak bergantung pada pengalaman dan penilaian petugas yang bertugas pada saat kejadian. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan alokasi sumber daya pada kejadian kebakaran dengan karakteristik yang relatif sama. Selain itu, mekanisme koordinasi antara Posko Utama dan pos wilayah juga menimbulkan tambahan waktu sebelum unit diberangkatkan. Kondisi ini diperkuat dengan belum tersedianya data waktu respons aktual yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses evaluasi darurat secara kuantitatif.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi *Emergency Evaluation* dalam penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran di Kota Makassar telah berjalan, namun masih menghadapi kendala pada akurasi identifikasi tingkat bahaya serta penentuan kebutuhan sumber daya yang belum didukung oleh parameter dan formula baku. Akibatnya, proses evaluasi darurat masih dipengaruhi oleh penilaian subjektif petugas dan belum sepenuhnya terstandarisasi.

3.3. Launch Corresponding Emergency Plans

Penulis menganalisis dimensi *Launch Corresponding Emergency Plans* berdasarkan indikator aktivasi protokol tanggap darurat. Dimensi ini merupakan tahap pelaksanaan rencana tanggap darurat setelah informasi kejadian dievaluasi dan kebutuhan sumber daya ditentukan. Di Kota Makassar, pelaksanaan tahap ini mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pengendalian Operasi Pemadaman Kebakaran yang mengatur tindakan petugas sejak tiba di lokasi hingga operasi dinyatakan selesai.

Berdasarkan hasil wawancara, ketika unit pertama tiba di lokasi kejadian, komandan regu bertindak sebagai *incident commander* dan wajib melaporkan kedatangannya melalui radio komunikasi. Selanjutnya, *incident commander* melakukan penilaian awal (*size up*) terhadap kondisi kebakaran dengan memperhatikan berbagai aspek seperti potensi bahaya listrik, jenis material yang terbakar, arah angin, potensi perambatan api, akses menuju lokasi, serta kebutuhan sumber daya tambahan. Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa kondisi kebakaran memerlukan bantuan tambahan, maka *incident commander* dapat mengajukan permintaan armada dan personel tambahan kepada perwira piket.

Hasil observasi peneliti saat mengikuti mobilisasi unit pemadam kebakaran menunjukkan bahwa prosedur tersebut dijalankan di lapangan. Setibanya di lokasi kebakaran, *incident commander* segera melakukan penilaian awal terhadap kondisi api dan lingkungan sekitar serta berkoordinasi dengan masyarakat untuk memastikan keberadaan korban. Setelah itu, *incident commander* membagi tugas kepada anggota tim dan memerintahkan dimulainya operasi pemadaman. Temuan ini menunjukkan bahwa prosedur aktivasi tanggap darurat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam standar operasional prosedur.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa konsistensi penerapan standar operasional prosedur masih dipengaruhi oleh kondisi lapangan. Standar waktu yang ditetapkan dalam prosedur, seperti batas waktu pelaksanaan penilaian awal dan penilaian lanjutan, tidak selalu dapat dipenuhi pada setiap kejadian karena dipengaruhi oleh skala kebakaran, kondisi lingkungan, serta tingkat kesulitan akses menuju lokasi. Selain itu, hingga saat ini belum tersedia data yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan petugas terhadap standar waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi *Launch Corresponding Emergency Plans* dalam penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran di Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Namun demikian, konsistensi penerapan prosedur dan pemenuhan standar waktu masih dipengaruhi oleh kondisi lapangan serta belum didukung oleh sistem evaluasi yang mampu mengukur tingkat kepatuhan secara objektif.

3.4. Emergency Rescue Action

Penulis menganalisis dimensi *Emergency Rescue Actions* berdasarkan tiga indikator, yaitu efisiensi akses lokasi, efektivitas operasi pemadaman kebakaran, dan efektivitas proses evakuasi. Dimensi ini merupakan tahap pelaksanaan tindakan penyelamatan di lapangan yang bertujuan mengendalikan kebakaran, menyelamatkan korban, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Pada indikator efisiensi akses lokasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi petugas adalah jalan sempit, kemacetan lalu lintas, dan ketidakjelasan alamat kejadian. Kondisi tersebut menyebabkan armada pemadam tidak selalu dapat mencapai lokasi dengan cepat. Temuan ini diperkuat oleh data durasi perjalanan unit pemadam kebakaran di Kota Makassar tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Distribusi Durasi Perjalanan Unit Pemadam Kebakaran Kota Makassar Tahun 2024

Durasi perjalanan	Jumlah Kejadian	Persentase
≤5 menit	122	40,3
6-10 menit	132	43,6
11-15 menit	38	12,5
>15 menit	11	3,6
Total	**303**	**100**

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar (diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan Tabel 1, sebanyak 16,1% kejadian membutuhkan waktu tempuh lebih dari 10 menit untuk mencapai lokasi kebakaran. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pada beberapa kejadian armada harus memutar melalui jalur yang lebih panjang karena akses terdekat tidak dapat dilalui kendaraan pemadam. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi akses lokasi masih menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran di Kota Makassar.

Pada indikator efektivitas operasi pemadaman kebakaran, hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas menerapkan taktik ofensif atau defensif sesuai kondisi lapangan. Ketika api masih dapat dikendalikan, petugas memfokuskan pemadaman pada sumber api. Namun apabila api telah membesar, prioritas dialihkan untuk melindungi bangunan di sekitarnya agar tidak terjadi perambatan kebakaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa strategi tersebut mampu mengurangi risiko kerugian yang lebih besar, meskipun kondisi bangunan yang mudah terbakar masih menjadi kendala dalam operasi pemadaman.

Pada indikator efektivitas proses evakuasi, keselamatan jiwa menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penyelamatan. Petugas melakukan penilaian awal terhadap keberadaan korban sebelum menentukan tindakan evakuasi yang diperlukan. Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi

dengan masyarakat sekitar sangat membantu proses identifikasi korban di lokasi kejadian. Namun demikian, asap tebal, bangunan yang tidak stabil, dan akses yang sempit masih menjadi tantangan yang dapat memperlambat proses evakuasi serta meningkatkan risiko bagi petugas.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi *Emergency Rescue Actions* telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai hambatan operasional berupa keterbatasan akses lokasi, kemacetan lalu lintas, kondisi bangunan yang mudah terbakar, serta kendala dalam proses evakuasi. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kecepatan dan efektivitas tindakan penyelamatan dalam penanganan kebakaran di Kota Makassar.

3.5. Emergency Recovery

Penulis menganalisis dimensi *Emergency Recovery* berdasarkan dua indikator, yaitu penetapan status aman dan pendinginan pasca operasi. Dimensi ini merupakan tahap pemulihan setelah operasi pemadaman dan penyelamatan selesai yang bertujuan memastikan lokasi kebakaran benar-benar aman serta tidak menimbulkan risiko kebakaran susulan.

Pada indikator penetapan status aman, hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan mengakhiri operasi tidak dilakukan segera setelah api padam. *Incident commander* terlebih dahulu melakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan tidak terdapat titik api aktif maupun potensi bahaya lain seperti bangunan yang berisiko runtuh. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa petugas melakukan pemeriksaan ulang terhadap area yang terbakar sebelum lokasi dinyatakan aman dan operasi dihentikan. Proses tersebut dilakukan secara hati-hati untuk mencegah munculnya kembali sumber bahaya setelah petugas meninggalkan lokasi.

Pada indikator pendinginan pasca operasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pendinginan merupakan prosedur wajib yang dilakukan setelah api berhasil dipadamkan. Petugas melakukan penyiraman ulang pada titik-titik yang masih berpotensi menyimpan panas serta memeriksa bagian bangunan yang sulit dijangkau untuk memastikan tidak terdapat bara api yang tersisa. Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun api sudah tidak terlihat, petugas tetap melanjutkan proses pendinginan hingga kondisi lokasi benar-benar aman. Durasi pendinginan bervariasi tergantung pada skala kebakaran yang terjadi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pemulihan darurat di Kota Makassar secara teknis telah berjalan dengan baik melalui kegiatan pendinginan dan verifikasi kondisi lapangan sebelum status aman ditetapkan. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa belum terdapat standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur parameter maupun indikator baku dalam fase *Emergency Recovery*. Akibatnya, penentuan waktu penghentian operasi dan penetapan status aman masih sangat bergantung pada penilaian petugas di lapangan.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi *Emergency Recovery* telah berjalan melalui kegiatan pendinginan pasca operasi dan penetapan status aman sebelum operasi dihentikan. Namun demikian, pelaksanaannya masih memerlukan standar operasional prosedur yang lebih spesifik agar proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih terukur, konsisten, dan mudah dievaluasi.

3.6. Evaluate Result and Feedback

Penulis menganalisis dimensi *Evaluate Result and Feedback* berdasarkan dua indikator, yaitu mekanisme evaluasi pasca penanganan dan implementasi hasil evaluasi. Dimensi ini merupakan tahap akhir dalam sistem tanggap darurat yang bertujuan menilai efektivitas penanganan kebakaran sekaligus menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penanganan pada kejadian berikutnya.

Pada indikator mekanisme evaluasi pasca penanganan, hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap kejadian kebakaran dievaluasi melalui laporan kejadian yang disusun oleh *incident commander* dan melalui diskusi internal atau *briefing* setelah operasi selesai. Evaluasi tersebut mencakup aspek waktu tanggap, kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi selama penanganan kebakaran berlangsung. Melalui mekanisme ini, petugas dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa mekanisme evaluasi yang berjalan belum sepenuhnya terstandarisasi. Hingga saat ini belum terdapat format baku laporan evaluasi yang wajib digunakan pada setiap kejadian maupun jadwal tetap pelaksanaan *briefing* evaluasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses evaluasi masih bergantung pada kebiasaan dan inisiatif petugas yang bertugas.

Pada indikator implementasi hasil evaluasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari proses evaluasi telah dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kapasitas personel, perbaikan prosedur operasional, peningkatan kesiapan peralatan, serta penguatan koordinasi dalam penanganan kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga telah digunakan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem tanggap darurat.

Meskipun demikian, belum terdapat sistem monitoring yang baku untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi dilaksanakan secara konsisten. Akibatnya, efektivitas tindak lanjut dari setiap rekomendasi belum dapat diukur secara objektif dan berpotensi mengurangi efektivitas proses perbaikan berkelanjutan.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi *Evaluate Result and Feedback* telah berjalan melalui mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi. Namun demikian, pelaksanaannya masih memerlukan standardisasi prosedur evaluasi serta sistem monitoring implementasi rekomendasi agar proses perbaikan berkelanjutan dapat berjalan secara lebih efektif dan terukur.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran di Kota Makassar telah berjalan pada seluruh tahapan *Emergency Response System*, namun masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang paling menonjol terletak pada sistem pelaporan yang belum terintegrasi, proses evaluasi yang masih bersifat subjektif, hambatan operasional di lapangan, serta mekanisme evaluasi dan koordinasi yang belum terstandarisasi secara formal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Barreirinha dan Silva-Afonso (2025) yang menemukan bahwa karakteristik wilayah perkotaan seperti jalan sempit dan keterbatasan akses menjadi tantangan dalam operasi pemadaman kebakaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa gang sempit, kemacetan lalu lintas, dan kepadatan permukiman masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tindakan penyelamatan di Kota Makassar. Kondisi tersebut berdampak pada waktu tempuh armada pemadam kebakaran menuju lokasi kejadian serta efektivitas pelaksanaan operasi di lapangan.

Pada aspek alokasi sumber daya, temuan penelitian ini memperkuat penelitian Zhang dkk. (2025) yang menekankan pentingnya sistem dan mekanisme yang jelas dalam penentuan kebutuhan sumber daya tanggap darurat. Penelitian ini menemukan bahwa penentuan jumlah armada dan personel di Kota Makassar masih didasarkan pada pengalaman dan penilaian petugas karena belum terdapat formula baku yang digunakan dalam proses perhitungan kebutuhan sumber daya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan pada kejadian kebakaran yang memiliki karakteristik serupa.

Sementara itu, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Wohlgemuth dkk. (2009) yang menunjukkan bahwa fase pemulihan pasca kebakaran telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang

terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Dalam penelitian ini, proses *Emergency Recovery* memang telah berjalan melalui kegiatan pendinginan dan penetapan status aman, namun belum didukung oleh standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur parameter dan indikator pelaksanaannya. Akibatnya, proses pemulihan masih sangat bergantung pada pengalaman dan pertimbangan petugas di lapangan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian mengenai manajemen tanggap darurat bencana kebakaran dengan menempatkan seluruh tahapan *Emergency Response System* dalam satu kerangka analisis yang utuh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan tanggap darurat kebakaran tidak hanya berasal dari aspek teknis operasional, tetapi juga dari aspek standardisasi prosedur, integrasi sistem, dan mekanisme koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 telah berjalan pada seluruh tahapan *Emergency Response System*, namun masih belum optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh sistem pelaporan yang belum terintegrasi, proses evaluasi dan penentuan kebutuhan sumber daya yang belum memiliki standar baku, hambatan operasional dalam pelaksanaan penyelamatan, serta mekanisme evaluasi dan koordinasi yang belum terstandarisasi secara formal.

Penelitian ini terbatas pada penyelenggaraan manajemen tanggap darurat bencana kebakaran di Kota Makassar dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi spesifik daerah penelitian dan belum dapat digenerallisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji manajemen tanggap darurat bencana kebakaran pada berbagai daerah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau komparatif guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas penyelenggaraan tanggap darurat kebakaran.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Paccinongang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adiyoso, W. (2018). *MANAJAMEN BENCANA PENGANTAR & ISU ISU STRATEGIS* (Retno Ayu Kusumaningtyas, Ed.). Bumi Aksara.

Arifin, M., Wunas, S., Sastrawati, I., Osman, W., Lakatupa, G., Mandasari, J., & Umar. (2022). Disaster Mitigation of Slum-Scale Fires in Jongaya Village at Tamalate. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1117*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1117/1/012027

Barreirinha, P., & Silva-afonso, A. (2025). *The Challenges of Firefighters ' Interventions in Old Urban Centres : A Case Study*.

BNPB. (2018). *INFO BENCANA Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual*. www.bnpb.go.id

Dandoulaki, M., Lazoglou, M., Pangas, N., & Serraos, K. (2023). Disaster Risk Management and Spatial Planning: Evidence from the Fire-Stricken Area of Mati, Greece. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(12). https://doi.org/10.3390/su15129776

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT*. PT. Nas Media Indonesia.

Harakan, A., Hilman, Y. A., Karso, A. J., Awaluddin, A., Nurhalijah, N., Muin, I. S., B, A. N., Fadillah, A., & Hardi, R. (2025). Inter-agency collaboration in building urban fire resilience in Indonesia: how do metropolitan cities address it? *Frontiers in Sustainable Cities*, *7*(February), 1–11. https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1492869

Madjid, U., Iksan, M. G., & Situmorang, A. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM RESPONSE TIME 7 MENIT LAYANAN PEMADAMAN GRATIS (ROTI 7 LAPIS) DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 148–166. https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i2.5733

Mandalapu, A., Seong, K., & Jiao, J. (2024). Evaluating urban fire vulnerability and accessibility to fire stations and hospitals in Austin, Texas. *PLOS Climate*, *3*(7). https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000448

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL* (Lutfiah, Ed.). Penerbit Media Sahabat Cendekia.

Reinhardt, G. Y., & Drennan, L. (2019). Local emergency management special issue: guest editors' introduction. *Local Government Studies*, *45*(3), 293–301. https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1598382

Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (3 ed.). Alfabeta.

Taufiqurokhman, Satispi, E., Trustisari, H., & Supangkat, G. (2023). *Keywords: Disaster mitigation, urban fires, Jakarta*. 2164–2177.

Trifianingsih, D., Agustina, D. M., Tara, E., Keperawatan, S., Suaka, S., & Banjarmasin, I. (2022). KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA KEBAKARAN DI KOTA BANJARMASIN (Community Preparedness to Prevent Fire Disaster in the City of Banjarmasin). *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, *7*(1).

Widyantoro, B. A., & Santosa, P. B. (2021). Network Analysis to Determine the Optimal Route for Firefighters in Makassar City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *936*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/936/1/012005

Zhang, X., Zhao, K., Gao, S., & Li, C. (2025). Optimization of Urban Fire Emergency Resource Allocation Based on Pre-Allocated Swarm Algorithm. *Fire*, *8*(1). https://doi.org/10.3390/fire8010027